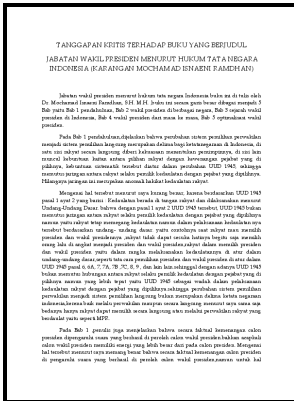


# Pengisian jabatan presiden & wakil presiden di Indonesia - suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

Nadhilah Ceria Indonesia - NASIONAL



Description: Election and occupation fulfillment system of president and vice president in Indonesia.

English Law

Indonesia -- Politics and government -- 1966-1998.

Vice-Presidents -- Indonesia.

Presidents -- Indonesia. Pengisian jabatan presiden & wakil presiden

di Indonesia - suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

-Pengisian jabatan presiden & wakil presiden di Indonesia - suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

Notes: Includes bibliographical references (p. 267-270).

This edition was published in 1995



Filesize: 30.105 MB

Tags: #PERKEMBANGAN #PENGISIAN #JABATAN #PRESIDEN #DI #BAWAH #UNDANG

## Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis — Universitas Indonesia

Golongan Karya, misalnya, sebagai organisasi sosial politik yang mempunyai suara mayoritas di MPR Single Majority memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Dewan Pembina. Desakan perwujudan demokratisasi di daerah pada gilirannya mengharuskan Presiden dan DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004 yang intinya menyetujui pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan.

## Gagasan Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Ketika Keadaan Darurat

Kedua, hilangnya ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat bekerja sama.

## NASIONAL

Harun Al-Rasyid, 1997, Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif Indonesia, YLBHI, Jakarta.

## PERKEMBANGAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DI BAWAH UNDANG

Paling tidak masih ada satu persoalan krusial yang belum disepakati, yaitu bagaimana jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat memenuhi persyaratan dalam ayat 3. Meskipun secara umum dapat dimaknai bahwa yang memulai semestinya partai politik pengusung yang menentukan 2 dua orang calon, tetapi partai politik pengusung tidak diberikan batasan waktu dalam menentukan dan mengusulkan calon tersebut. Dengan perannya sebagai pemilih, seperti DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian terhadap syarat-syarat calon yang didasarkan pada ketentuan syarat calon wakil kepala daerah dalam UU Pilkada.

## PERKEMBANGAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DI BAWAH UNDANG

UU Pilkada memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai institusi penyelenggara

Pilkada, yang mana institusi ini telah eksis sejak pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2014. Supaya kepala daerah terarah dalam menjalankan kewenangannya mengendalikan pemerintahan di daerah, dihadirkan lembaga legislatif daerah DPRD yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang *check and balance* atas segala tindakan kepala daerah.

## Related Books

- [Knight](#)
- [Creating community - an action plan for parks and recreation](#)
- [Privredno-poslovni rečnik, srpskohrvatsko-engleski - 24,500 terminoloških jedinica](#)
- [Bibliographical services throughout the world in 1980 = - Les services bibliographiques dans le mond](#)
- [Music, experiment and mathematics in England, 1653-1705](#)